

PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI DESA TUMBANG BANTIAN

by Jurnal Mediasosian

Submission date: 05-May-2023 05:08AM (UTC-0400)

Submission ID: 2084934929

File name: Journal_manager,_Naskah_Hal_48-58.doc (148.5K)

Word count: 2917

Character count: 19841

6

PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI DESA TUMBANG BANTIAN

1
*Ferry Setiawan

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka
Raya, Indonesia

*Email Korespondensi: setiawan.ferry36@fisip.upr.ac.id

4 Abstrak

Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintahan desa disusun dan ditetapkan dengan peraturan desa. Rencana pembangunan menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan serta belanja desa yang dituangkan didalam keputusan pemerintah. Badan desa berperan sendiri-sendiri dalam berusaha menciptakan suasana yang dapat menumbuhkan kerelaan masyarakat untuk bergotong royong demi pembangunan desa, dan di sisi lain masyarakat juga berperan aktif dalam upaya memaksimalkan pembangunan. Salah satu desa di Indonesia yang menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah desa Tumbang Bantian. Dalam hal ini diyakini jika perencanaan dilakukan dengan baik dan cermat maka sistem pemerintahan akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat dan visi misi pemerintah desa. Dalam artikel ini, Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran singkat pelaksanaan proses Musrenbangdes. Dalam hal metodologi, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di desa Tumbang Bantian dilihat dari enam indikator, dilaksanakan tetapi tidak terlaksana dengan baik dalam proses perumusan masalah karena adanya ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan desa dan yang terpenting, masyarakat, karena masih dianggap bahwa masyarakat tidak dapat merumuskan masalah karena lebih mementingkan kebutuhan daripada kebutuhan. Bahkan dengan proses identifikasi beban yang dilakukan di desa Musrenbang masih bersifat konkrit, tanpa mempertimbangkan spesifikasi terkait kapasitas yang ada di wilayah desa Tumbang Bantian.

Kata Kunci: Perencanaan; Pembangunan; Desa.

13 Abstract

The mid-term rural development plan and the rural government work plan are designed and established by village rules. The development plan is the focus of the income budgeting and the purchase of villages funded by government decisions. The village body plays its own role in trying to create a climate that can increase the public's willingness to cut royong for village development, and on the other hand society also plays an active role in maximizing development.

One of the villages in Indonesia that hosted the guests of village planning is the village of Tumbang Bantian. In this case it is believed that if the planning is carried out properly and carefully, the government system will work well in accordance with the expectations of the community and the vision and mission of the village government. In this article, the aim of this research is to get a brief description of the implementation of the Musrenbangdes process. In terms of methodology, the authors use qualitative research with a descriptive approach. The results of this study reveal that the implementation of the Museum of Rural Development Planning (Musrenbangdes) in the village of Tumbang Bantian is seen from six indicators, carried out but not done well in the process of demolition problems because there is a mistrust of village leadership and the most important. society, because it's still assumed that society can't ruin problems because it's more about needs than needs. Even with the burden identification process carried out in the village of Musrenbang is still concrete, without considering the related capacity specifications in the village of Tumbang Bantian.

Keywords: *Planning; Development; Village.*

PENDAHULUAN

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum, serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan membantu mewujudkan ketertiban dunia dan perdamaian abadi” (Setiawan, 2019).

Pembangunan desa bertujuan untuk kualitas hidup serta kehidupan demi kepentingan umum serta tidak lepas dari kepentingan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, karena keterkaitannya harus dilihat pada status desa seperti masalah sosial, masalah ekonomi, serta masalah pada kepentingan pasar dan politik. Pembangunan tidak lain adalah upaya untuk berubah menuju ke keadaan yang lebih baik berdasarkan standar tertentu (Rosana, 2012). Pembangunan merupakan hal yang paling penting dalam menentukan keberlangsungan masa depan sebuah bangsa dan negara. Oleh sebab itu, pembangunan yang baik dapat terwujud dengan baik jika didukung oleh proses perencanaan yang baik (Sembel et al., 2017).

Pembangunan dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dapat juga berupa pembangunan fisik berupa gedung, infrastruktur dan ruang publik (Nurwanda, 2018). Pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat biasanya secara langsung menghasilkan kebutuhan pasar domestik, baik rumah tangga, individu atau industri. Pembangunan yang dilakukan oleh negara biasanya hanya tertuju pada pembangunan fisik atau

kelembagaan yang mempunyai fungsi penting dapat berupa sebagai peluang maupun penunjang kebutuhan pasar domestic semata.

Pembangunan *non fisik* merupakan salah satu bagian dari pembangunan yang muncul dari motivasi kelompok lokal atau bersifat jangka panjang (Setiawan, F dan Rhama, 2021). Pembangunan daerah tidak hanya menyangkut pelaksanaan program-program pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan non fisik atau sosial. Maka dari itu, pembangunan harus memiliki kesesuaian dari pembangunan *fisik* dan *non fisik*. Maka dari itu, tentunya menjadi bagian dari pembangunan *non fisik* atau sosial, seperti berupa indicator pada pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan serta pendidikan (Kuncoro, 2012).

Pemerintahan tingkat desa berperan secara tersendiri dalam mengupayakan untuk menciptakan suasana yang dapat menumbuhkan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi demi pembangunan desa, pada pandangan lain juga diharapkan masyarakat juga berperan aktif dalam upaya memaksimalkan pembangunan. Demikian juga upaya dalam pembangunan desa ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi perubahan sosial masyarakat desa itu sendiri dan memberikan arti penting desa sebagai basis perubahan (Kurnia et al., 2020). Dalam pembangunan desa diharapkan akan dilaksanakan serta diarahkan dengan baik sesuai dengan tujuan semula (Fauzi & Oxtavianus, 2014).

Pemerintahan desa menyusun dan menetapkan dengan peraturan desa dalam pedoman untuk anggaran serta pendapatan dan belanja desa yang dituangkan dan diatur pada keputusan pemerintah. Perundang - undangan Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa untuk menyusun serta menetapkan dengan peraturan desa. Hal tersebut itu sendiri akan menjadi sebuah pedoman bagi perumusan anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar (Todaro & Smith, 2012).

Keikutsertaan serta keterlibatan masyarakat menjadi hal terpenting dalam perencanaan pembangunan karena bagian dari proses demokrasi serta partisipasi. Oleh karena itu, agar Musrenbang lebih signifikan dalam pembangunan berkelanjutan, perangkat desa harus mensinkronisasikan kegiatan tersebut dengan kebutuhan masyarakat sehingga lebih banyak dana yang tersedia di desa. Hal tersebut agar

dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Musrenbang merupakan forum antar pemangku kepentingan (Prayitno & Maulida Baiq, 2019). Jika rencana tersebut disusun secara bersih dan hati-hati, maka sistem pengelolaan akan berjalan dengan sebagaimana mestinya, berdasarkan keinginan masyarakat dan pencapaian program visi dan misi kepala desa. ²⁴ Musrenbang adalah forum di mana masyarakat dapat menyampaikan keinginannya tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah tingkat terendah dalam proses pembangunan yang layak dan sebaliknya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam pembangunan yang layak (Jamaludin, 2016).

Prioritas pembangunan juga disesuaikan dengan kebutuhan desa dan masyarakat desa. Akuisisi, pengembangan dan pemeliharaan pembangunan sektor ekonomi dalam program ini bertujuan untuk meningkatkan peluang ekonomi yang baik bagi masyarakat maupun pemerintah desa (Nurwanda, 2018).

Fokus pembangunan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan dan program pembangunan yang dilaksanakan. Namun dalam praktiknya, musrenbangdes seringkali tidak mencerminkan semangat refleksi partisipatif dan dialogis, karena keterlibatan *community* atau masyarakat dalam sebuah proses *Planning* atau perencanaan pembangunan masih rendah. Hal tersebut diatur pada peraturan perundang - undangan desa, musyawarah tersebut dideklarasikan oleh kepala desa dalam satu periode kepala desa yang harus mengadakan musrenbangdes sebanyak tiga kali.

²⁶ Berdasarkan latarbelakang diatas maka yang menjadi masalah adalah bagaimana proses pelaksanaan Musrenbang desa yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan Musrenbang desa agar dapat memberikan masukan serta ontok bagi desa-desa lainnya yang ada di Kalimantan Tengah sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut.

Pada kenyataannya hanya digunakan sebagai formalitas tanpa melibatkan berbagai elemen masyarakat, sehingga keinginan yang diterima di tingkat desa tidak sekedar keinginan masyarakat semata, tetapi juga bercampur dengan kepentingan semua pemangku kepentingan, sehingga perencanaan pembangunan yang selama ini masih bersifat *top-down* yang mencerminkan sikap pemerintah dapat berubah kearah *botton-up*

28
planning, agar mampu mendukung serta menjadikan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

7 **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk memperjelas ciri-ciri objek dan objek penelitian, menemukan gejala yang ada di masyarakat, terkait dengan pelaksanaan refleksi dalam rencana pembangunan desa (musrenbangdes). Dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini juga memudahkan penulis 17 untuk memperoleh data yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah di kemukakan yaitu Bagaimana Proses Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan di 18 Desa Tumbang Bantian Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya. Selain itu penulis juga ingin 22 melihat secara langsung fenomena yang terjadi di masyarakat yang di lakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif dengan mengkaji Bagaimanakah Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang desa). Bahan penelitian disusun dan diinterpretasikan secara komprehensif dan menyeluruh serta disajikan secara jelas dan interpretatif, sehingga hasil penelitian, kesimpulan dan rekomendasi penelitian dapat dideskripsikan secara kompeten dan akurat sesuai kaidah ilmiah. Untuk memudahkan pemantauan data penelitian, maka peneliti melakukan pengaturan sampel. Sampel penelitian yang di ambil dengan pendekatan teknik *purposive sampling*. Sedangkan 10 teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan sebagai usaha dan referensi dalam mengupayakan 11 perubahan yang direncanakan dan sadar oleh sebuah negara dan pemerintah untuk menuju modernitas dalam konteks pembangunan (Siagian, 2008). Pendapat lain menyatakan bahwa, Proses perbaikan masyarakat atau seluruh mekanisme sosial yang terus menerus menuju kualitas hidup yang lebih baik serta bermartabat, hal tersebut juga dapat diartikan bahwa

pembangunan adalah pemeliharaan, produksi atau penguasaan sesuatu yang belum ada baik yang sistematis; terorganisir; disengaja dan dirancang untuk mencapai situasi di mana elemen umum sebagai proses desain (Rustiadi et al., 2011).

Rencana sendiri didefinisikan sebagai proses terus menerus yang melibatkan pembuat kebijakan atau keputusan tentang berbagai cara alternatif untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan (Kuncoro, 2012). Perencanaan didefinisikan sebagai tatalaksana dalam menunjang alternatif kebijakan agar dilaksanakan pada priode yang akan datang dan ditujukan dalam mewujudkan tujuan tertentu. Menurut pendapat lain, selama perencanaan perlu: (1) Dengan adanya perencanaan diharapkan adanya arah operasional, tatalaksana kegiatan dalam mewujudkan tujuan pembangunan. (2) Penilaian kemungkinan ke depan, prospek pengembangan, hambatan dan risiko dapat dilakukan pada saat perencanaan. (3) *Planning* atau Perencanaan menawarkan peluang dalam membuat pemutusan kebijakan terbaik. (4) Dengan kehadiran rencana, skala prioritas disediakan sesuai dengan tujuan. (5) Desain atau standar dalam pembuatan pedoman penilaian (Tarigan, 2005). Dengan demikian, secara singkat tersirat perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan secara berkesinambungan dalam bertindak sebagai panduan terukur untuk mewujudkan kebijakan tertentu dalam menentukan pilihan yang berbeda berdasarkan sumber daya yang ada (Setiawan & Saefulloh, 2019).

aktivitas atau aktivitas yang fisik (materi) dan tidak fisik (mental dan spiritual). untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Sementara Hukum No. 25 dari 2004 SPPN (National Development Planning System) Rencana pengembangan terdiri dari empat tahap yaitu, Penyiapan rencana, Penetapan rencana, Pengendalian pelaksanaan rencana, serta evaluasi. Pelaksanaan rencana tersebut, dapat diartikan bahwa suatu proses di mana berbagai pilihan atau berbagai keputusan dirumuskan secara sistematis dan berdasarkan fakta dan berdasarkan berbagai kegiatan fisik atau non fisik dilakukan untuk tujuan yang lebih baik dikatakan perencanaan pembangunan (Nurwanda, 2018).

Mengingat proses perencanaan pembangunan yang berlangsung di Desa Bantian Tumbang digunakan 6 tahapan perencanaan yang meliputi, *Research* atau penyelidikan, *Problem Notification* atau perumusan masalah, *Support Power Identification* atau identifikasi daya dukung, *Objective Notification* atau perumusan tujuan, *Step-by-Step*

Setting atau menetapkan langkah – langkah, serta *Budget Planning* atau merancang anggaran (Abe, 2002).

Pelaksanaan proses tahapan perencanaan musrenbang di Desa Tumbang Bantian untuk mengetahui bagaimana proses tahapan perencanaan pembangunan yang tepat di Desa Tumbang Bantian, penulis berpedoman pada 6 tahapan perencanaan yang dikemukakan oleh Abe Alexander sebagai berikut :

(1) *Research* atau penyelidikan

Untuk melaksanakan hal tersebut, maka yang dilakukan di desa Tumbang Bantian sebelum merencanakan pembangunan desa Musrenbang, kepala desa menetapkan sebuah kelompok mediator desa Musrenbang yang terdiri dari BPD dan pejabat pemerintah desa lainnya. Misi Tim Fasilitator Musrenbang desa adalah untuk memudahkan implementasi negosiasi tingkat desa dan implementasi program Pemilihan perencanaan pembangunan Musrenbang desa. Selain itu, tim melakukan penelitian dengan mengeksplorasi informasi yang dikirim oleh peserta Musrenbang desa sebagai perwakilan komunitas lokal, serta penyelidikan ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengetahuan yang sedang berkembang di kelompok perwakilan masyarakat dengan memegang aktivitas yang menarik mereka. Untuk aktivitas ini, perangkat BPD bertanya apa kebutuhan atau masalah dihadapi oleh masyarakat desa, agar hal tersebut berguna sebagai sumber dalam menerapkan rencana pembangunan desa masa depan. Pada pelaksanaan Musrenbang desa, semua peserta pada setiap wakil delegasi kelompok masyarakat memiliki wewenang untuk hadir dalam acara untuk memberikan masukan sebagai kebutuhan pembangunan karena peserta delegasi desa memberikan masukan kepada tim yang dikenal dan fasilitator Musrenbang desa. Perwakilan kelompok masyarakat, khususnya perwakilan setiap perwakilan di musrenbang biasanya pasif, hanya pihak pemangku kepentingan yang aktif mengungkapkan pendapat mereka.

(2) *Problem Notification* atau perumusan masalah

Ketika dilakukan di desa Tumbang Bantian, perumusan masalah yang dikumpulkan dari proses penyelidikan sebelumnya disesuaikan ke tugas utama

dan fungsi masing-masing bagian perangkat desa Tumbang Bantian untuk memudahkan identifikasi masalah. Masalah seperti kemiskinan atau masalah kesehatan merupakan masalah utama yang hanya disampaikan oleh pejabat desa dan BPD sebagai institusi yang mewakili perwakilan masyarakat, tanpa adanya melibatkan masyarakat secara umum, karena ketika dilakukan dengan masyarakat, biasanya tidak berjalan dengan baik. BPD masih tidak mempercayai masyarakat untuk memberikan masukan dalam rencana pembangunan karena masih banyak yang tampaknya memberikan prioritas pada subjektivitas atau melamar program dan aktivitas berdasarkan keinginan mereka sendiri tanpa melihat apa yang diperlukan.

(3) *Support Power Identification* atau identifikasi daya dukung

Dalam praktek, identifikasi daya dukung pada desa Tumbang Bantian hanya dalam bentuk seperti anggaran yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kepada desa Tumbang Bantian untuk melaksanakan program dan aktivitas yang akan berlangsung untuk tercapainya pembangunan tanpa melihat potensi wilayah desa yang dimilikinya.

(4) *Objective Notification* atau perumusan tujuan

Berkaitan dengan pelaksanaan, bentuk tujuan dalam perencanaan pembangunan di Musrenbang desa Tumbang Bantian adalah tujuan jangka pendek, yaitu untuk mengejar tujuan tahunan jangka menengah yang ditetapkan pada tingkat atas, yaitu pemerintah di tingkat Kecamatan, dalam Musrenbang desa Tumbang Bantian, semua aktivitas dan program telah ditentukan dan dikumpulkan menurut tipenya, diantaranya, Pembangunan fasilitas (fisik) dan infrastruktur, yang di dalamnya termasuk infrastruktur baik itu lingkungan ataupun jalan. Selain itu juga kegiatan aktivitas non - fisik juga seperti aktivitas sosial atau hanya aktivitas budaya.

(5) *Step-by-Step Setting* atau menetapkan langkah – langkah

Dalam proses Musrenbang, program dan aktivitas yang diproduksi di desa Tumbang Bantian sangat jelas dan rinci. Apa saja program yang akan dikerjakan atau dilakukan, seperti pembangunan infrastruktur jalan, sarana dan prasarana

atau aktivitas pembangunan sumber daya manusia di desa Tumbang Bantian yang jelas dinyatakan dalam dokumen rencana, dan dokumen rencana tersebut di Musrenbang desa Tumbang Bantian juga telah disepakati siapa saja yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti pengaspalan jalan, dan pengembangan kompetensi masyarakat desa yang difasilitasi oleh desa.

(6) *Budget Planning* atau merancang anggaran

Dalam pelaksanaannya, proses perencanaan pembangunan desa Tumbang Bantian khususnya desa Musrenbang mengalokasikan aktifitas dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada dokumen perencanaan dengan besaran angka tertentu. Selain itu, sejumlah nominal diberikan kepada yang bertanggung jawab atas alokasi dana tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan diskusi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) di desa Tumbang Bantian, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaannya masih belum terlaksana sesuai dengan 6 tahapan perencanaan yang dikemukakan oleh Abe Alexander. Dimana, pada tahap desa Musrenbang tahap observasi atau survei tidak bekerja efektif dan efisien karena tanpa diberi peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatan mereka. Sedangkan pada proses membentuk masalah itu tidak dilakukan dengan benar disebabkan dilakukan pada saat sebelum Musrenbang desa, serta hanya dihadiri oleh sekretaris desa, kepala organisasi pemuda, kaur atau kasi pembangunan, anggota LPM, KPMD, kepala RT, tanpa dihadiri oleh masyarakat secara umum. Pada tahapan mengidentifikasi potensi yang dilakukan di musrenbang desa masih berupa keuangan tanpa melihat potensi wilayah daerah desa Tumbang Bantian.

Berdasarkan hasil penelitian, diskusi dan kesimpulan yang telah dinyatakan di atas, berikut adalah saran dari peneliti, antaralain :

- ① *Stakeholders* untuk menghadiri dan aktif berpartisipasi dalam aktivitas musrenbang di desa Tumbang Bantian serta pemberitahuan kepada masyarakat

untuk mencari tahu mana yang menjadi sebuah masukan didasarkan pada kebutuhan yang utama.

- (2) Harus ada sikap kepercayaan dari tokoh desa Bantian Tumbang untuk diskusi termasuk formulasi masalah didasarkan saran yang telah diberikan oleh masukan masyarakat.
- (3) Adanya mendiskusikan daya dukung berdasarkan potensi daerah di wilayah desa Tumbang Bantian.

REFERENSI

- Abe, A. (2002). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Pondok Edukasi.
- Fauzi, A., & Oxtavianus, A. (2014). Measurement of Sustainable Development in Indonesia. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v30i1.445>
- Jamaludin, A. N. (2016). *Sosiologi Pembangunan*. Pustaka Setia.
- Kuncoro, M. (2012). *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan?* Salemba Empat.
- Kurnia, A., Shaura, A., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2020). Sustainable Development Dan CSR. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i3.26211>
- Nurwanda, A. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik (Studi Analisis Kebijakan Pemerintah Desa). *Unigal*, 2(1), 28–39.
- Prayitno, G., & Maulida Baiq, A. T. N. (2019). Modal Sosial , Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan Desa Ngadireso , Indonesia Social Capital , Food Security and Sustainable Agriculture in Ngadireso Village , Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*.
- Rosana, E. (2012). Politik Partai Politik dan Pembangunan. *TAPIS*.
- Rustiadi, Ernan, Sunsun, Saefulhakim, & Dyah, R. P. (2011). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Cresspen Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sembel, T., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Singsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Eksekutif*, 2(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/viewFile/16194/15698>
- Setiawan, F dan Rhama, B. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang

Bedagai. *Jurnal Mediansosian*, 7(1), 14–28.

Setiawan, F. (2019). Pengaruh Teori Pembangunan Dunia Ke -3 Dalam Teori Modernisasi Terhadap Administrasi Pembangunan Di Indonesia. *JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 8 No 2, 59–69. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/view/1033/831>

Setiawan, F., & Saefulloh, A. (2019). Kolaborasi Yang Dilaksanakan Di Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 10(2), 71–80. <https://doi.org/10.23960/administratio.v10i2.95>

Siagian, S. P. (2008). *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Bumi Aksara.

Tarigan, R. (2005). *Perencanaan Pembangunan Wilayah Edisi Revisi*. Bumi Aksara.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesebelas)*. In *Economic Development*. Pearson.

PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI DESA TUMBANG BANTIAN

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | ojs.unik-kediri.ac.id Internet Source | 5% |
| 2 | Yohanes Kornelius Ethelbert, Subando Agus Margono, Muhammad Rizki Pratama. "FORMASI KEKUASAAN BIROKRAT GARIS DEPAN DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULA PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR", Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 2022 Publication | 2% |
| 3 | ejournal3.undip.ac.id Internet Source | 2% |
| 4 | repository.uir.ac.id Internet Source | 1% |
| 5 | Yogi Widya Saka Warsaa, Nicholaus Wayong Kabelen. "Analisi Visual Penerapan Brand Equity Pada Video City Branding "Shining | 1% |

Batu"', Jurnal Desain Komunikasi Visual Asia, 2023

Publication

| | | |
|----|--|------|
| 6 | ejournal.an.fisip-unmul.ac.id Internet Source | 1 % |
| 7 | jurnal.unived.ac.id Internet Source | 1 % |
| 8 | garuda.kemdikbud.go.id Internet Source | 1 % |
| 9 | core.ac.uk Internet Source | <1 % |
| 10 | digilib.isi.ac.id Internet Source | <1 % |
| 11 | Submitted to iGroup Student Paper | <1 % |
| 12 | www.denbar.denpasarkota.go.id Internet Source | <1 % |
| 13 | Baihaqi Baihaqi. "VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT (CHANGES APBDesa AND IMPLEMENTATION) IN THE TIME OF THE COVID-19 PANDEMIC", Jurnal Akuntansi, 2022 Publication | <1 % |
| 14 | Submitted to Universitas Jember Student Paper | <1 % |
| 15 | docplayer.hu Internet Source | |

<1 %

16

eprints.peradaban.ac.id

Internet Source

<1 %

17

ashinkafa.blogspot.com

Internet Source

<1 %

18

jdih.kpu.go.id

Internet Source

<1 %

19

publikasi.unitri.ac.id

Internet Source

<1 %

20

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

21

bimtekpemerintahdaerah.wordpress.com

Internet Source

<1 %

22

123dok.com

Internet Source

<1 %

23

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

<1 %

24

download.garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

<1 %

25

ojs.uho.ac.id

Internet Source

<1 %

26

repositori.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

27 repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

28 Adinda Dewi Asmara, Armyn Gultom, Rahmat Salam, Nida Handayani. "PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA", Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 2022

Publication

<1 %

29 Indriati Suci Pravitasari. "Tinjauan Ilustrasi Pada Desain Kemasan "Teh Tjap Gardoe" Ditinjau dari Elemen Visual", Jurnal Desain Komunikasi Visual Asia, 2023

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI DESA TUMBANG BANTIAN

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11
